

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan suatu wilayah dilihat dari berjalan atau tidaknya pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan tentunya merupakan rencana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dikatakan bahwa program ini merupakan implementasi dari tugas pelayanan maka dari itu, dalam pelaksanaan rencana tersebut, kajian realisasi manfaat sosial tentu menjadi perhatian utama. Bentuk utama dari setiap daerah adalah untuk membentuk suatu perekonomian, tentunya untuk kemakmuran daerah atau penduduknya hanya bila pembentukan atau pembangunan ekonomi daerah berjalan sesuai rencana maka kesejahteraan dapat diperoleh. Bentuk utama dari setiap daerah adalah untuk membentuk suatu perekonomian, tentunya untuk kemakmuran daerah atau penduduknya hanya bila pembentukan atau pembangunan ekonomi daerah berjalan sesuai rencana maka kesejahteraan dapat diperoleh.

Kuncoro (2006), menjelaskan terdapat penunjuk utama dalam menentukan kesuksesan pembentukan ekonomi di negara berkembang. Salah satu penunjuknya adalah, percepatan pertumbuhan ekonomi. Menurut penilaian kaum tradisional, percepatan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang menentukan keberhasilan pembentukan ekonomi. Jika masyarakat bisa membuka dan

menjalankan usahanya, maka keberhasilan yang mapan dalam bidang ekonomi tentu merupakan keberhasilan. Usaha yang dibuat oleh masyarakat itulah juga yang akan menjadi salah satu dasar untuk mengembangkan pembangunan di wilayah tersebut.

Di era globalisasi sekarang ini, banyak sekali keperluan yang harus disiapkan untuk memulai usaha. Para pelaku usaha perlu menyiapkan beberapa keperluan sebelum memulai usahanya, mulai dari alat, bahan dan biaya-biaya lainnya. Oleh sebab itu, para pelaku usaha tentunya harus mempunyai modal yang cukup. Akan tetapi nyatanya akibat keterbatasan modal beberapa pelaku usaha tidak bisa memulai dan mengembangkan usahanya. Maka dari itu, untuk bisa memulai usahanya mereka harus mendapat pinjaman modal. Pesatnya perubahan kegiatan ekonomi saat ini juga membutuhkan lebih banyak sumber dana untuk memanfaatkan kegiatan ekonomi tersebut. Dengan begitu, lembaga keuangan memiliki peran yang penting dalam membangun atau menggerakkan roda perekonomian di suatu daerah.

Menurut Pasal 1 Keputusan Nomor 14 Tahun 1967, lembaga keuangan adalah lembaga yang kegiatannya menyimpan keuntungan modal nasabah atau penabung dan kemudian mengembalikannya kepada masyarakat. Lembaga keuangan juga merupakan entitas komersial yang menyediakan dana atau pinjaman pada nasabah dan menginvestasikan dananya dalam surat berharga. Menurut Siamat (2014), Lembaga keuangan juga menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk tabungan, asuransi, program pensiun, perlindungan, penyediaan sistem pembayaran, dan mekanisme transfer dana. Masing-masing daerah sudah disediakan lembaga jasa keuangan dimana, nantinya akan bergerak dengan

menggalang dana dari masyarakat. Selain menggalang dana mereka juga akan memberikan dana tersebut untuk proyek-proyek pembangunan sehingga mereka bisa memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase di kemudian hari. Terdapat banyak manfaat dari lembaga keuangan salah satunya yaitu manfaat dari segi likuiditas. Pada manfaat ini, masyarakat yang memerlukan keperluan bisa mendapatkan biaya dengan mudah sehingga tidak merasa cemas dalam memenuhi kebutuhannya. Pembangunan yang dilakukan jauh dari campur tangan seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan desa. Sebagaimana tertuang dalam APBDes, desa memiliki sumber pendapatan yang perlu dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Pendapatan yang diperoleh akan menjadi kekuatan utama bagi desa untuk menciptakan keunggulan daerah (Yuniarta & Purnamawati, 2020).

Wilayah pedesaan merupakan wilayah yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ekonomi, karena wilayah pedesaan jauh dari jangkauan kebijakan pemerintah akibat alasan fisik lokasional. Pembangunan pedesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau tidak dapat dipisahkan dari pembangunan negara, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan memberikan bantuan perkreditan untuk kegiatan komersial di pedesaan, salah satu langkah utamanya adalah dengan meningkatkan kegiatan perkreditan di pedesaan. Oleh karena itu, lembaga kredit publik, disingkat LPD.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah usaha simpan pinjam milik masyarakat desa pakraman (desa adat) dan merupakan sarana perekonomian masyarakat desa. LPD kini telah menjadi lembaga intermediasi yang efektif dalam

mengumpulkan dan menyalurkan kredit untuk mengembangkan usaha-usaha krama desa setempat. Lembaga perkreditan desa tidak hanya sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang atau usaha menghimpun dana dan penyediaan dana, akan tetapi juga memotifasi dan mendorong inovasi dalam berbagai cabang kegiatan ekonomi yang ada di pedesaan.

Menurut dokumen Nomor 3 tentang Desa Pakraman dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 ditegaskan bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga yang diselenggarakan, dikelola dan dimiliki oleh Desa Pakraman dan hanya melayani kebutuhan anggota Desa Pakraman. Masyarakat Desa Pakraman. Pasal 10 Peraturan Daerah tentang Lembaga Perkreditan Desa Nomor 8 Tahun 2002 Provinsi Bali menyatakan bahwa LPD adalah lembaga pemberi pinjaman tingkat desa dari (selanjutnya disebut desa) dan merupakan unit masyarakat hukum adat di Desa Pakraman, Provinsi Bali. Dengan tradisi dan kehidupan sosial masyarakat, cara umat Hindu turun temurun dihubungkan Khayangan Tiga atau Khayangan Desa, mereka memiliki wilayah tertentu dan aset mereka sendiri, dan memiliki hak untuk mengurus keluarga mereka sendiri. Pasal 2 (1) “Peraturan Daerah” mengatur bahwa LPD adalah badan usaha keuangan yang dimiliki oleh Desa dan melakukan kegiatan usaha untuk Desa Krama di lingkungan Desa.

Lembaga perkreditan desa (LPD) pada dasarnya memiliki suatu sistem pengelolaan yang melekat dengan hukum adat di Bali. Dalam perkembangannya beberapa LPD di berbagai desa pakraman telah berhasil menjalankan LPDnya dengan baik sehingga LPD menjadi salah satu sumber pendapatan desa. Namun terdapat pula beberapa LPD yang menunjukkan kondisi kurang sehat dan

tidak berjalan (macet) sehingga hal tersebut dapat menghambat kelangsungan hidup LPD di Bali. Kondisi seperti itu diakibatkan oleh beberapa faktor salah satunya kegiatan LPD pada layanan kredit. Layanan kredit tidak dijalankan dengan maksimal sehingga LPD tersebut harus mengalami masalah karena terdapat kredit macet. Maka dari itu, perlu sekali adanya pengawasan yang baik dalam layanan ini karena kredit merupakan salah satu kegiatan LPD yang paling menonjol dikalangan masyarakat.

Salah satu LPD yang terdapat di provinsi Bali yaitu LPD seririt yang berada di Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. LPD Seririt juga merupakan lembaga keuangan yang masih aktif dan lancar dalam pemberian kreditnya. LPD Seririt dipilih sebagai objek penelitian karena didasarkan oleh jumlah kredit macet yang terbilang rendah dibandingkan LPD lain yang berada di Kecamatan Seririt. LPD seririt baru memiliki dua produk keuangan seperti pinjaman dana (kredit) dan tabungan dengan nasabah aktif 90 orang. Dalam kegiatan bisnis sehari-hari, LPD Seririt sangat mementingkan sistem informasi akuntansi yang berlaku. Sejak didirikan, LPD berharap dapat mendukung pengembangan ekonomi desa dan kebiasaan budidaya pinjaman usaha kecil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa menciptakan dan memberikan pelayanan melalui sektor keuangan.

Salah satu keunikan dari LPD Seririt dibandingkan dengan LPD yang lain yaitu, dimana LPD Seririt ini tidak memberikan sanksi ekstrim kepada debitur yang tidak taat membayar kredit. Sesuai apa yang telah disampaikan oleh ketua LPD Seririt, bahwa apabila terdapat debitur yang tidak taat dalam pelunasan pinjaman, maka pihak LPD hanya melakukan pendekatan kepada debitur dengan

mendatangi rumah dan membicarakannya secara kekeluargaan saja. Dengan adanya pendekatan seperti yang disampaikan, diharapkan para debitur atau calon debitur nantinya memiliki tanggung jawab yang besar dalam melunasi pinjamannya. Disamping itu LPD Seririt juga menerapkan sistem informasi akuntansi yang dijalankan sebisa mungkin meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemberian pinjaman dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil observasi awal di LPD Seririt, terlihat pada data kredit bahwa kredit lancar lebih tinggi dibandingkan dengan kredit tidak lancar. Maka dari itu, ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem informasi akuntansi diterapkan secara maksimal, dapat meminimalisir terjadinya kendala-kendala atau masalah yang akan terjadi sehingga dapat mengurangi angka kredit macet. Disamping itu, pengendalian kredit dalam menciptakan lembaga perkreditan yang sehat pada LPD seririt menggunakan prinsip 5C yaitu, *Character* / watak, *Capacity* / kemampuan, *Capital* / modal, *Collateral* / agunan, dan *Condition of economy* / kondisi perekonomian. Selain pelayanan dan prinsip yang diterapkan, tentunya sistem informasi akuntansi sangat berperan penting untuk mendukung program kredit di LPD Seririt.

Kredit adalah kemampuan untuk membeli atau meminjamkan, dan berjanji untuk membayar dalam jangka waktu yang disepakati atau menunda pembayaran (Muljono, 1990). Kredit juga salah satu bidang keuangan yang banyak diminati oleh masyarakat desa. Kredit ini diharapkan dapat memajukan masyarakat desa untuk mendapatkan sumber dana alternatif, sebagian keuntungan LPD digunakan untuk membiayai kegiatan desa dan mendukung pembangunan ekonomi berbagai sektor masyarakatpedesaan (Pertamawati, 2008). Kredit merupakan suatu bentuk

kepercayaan LPD terhadap masyarakat dalam hal ini tentu mengandung ketidakpastian sehingga resiko kredit macet dan penyalahgunaan kredit sangat mungkin terjadi dalam pemberian kredit. Didalam pemberian kredit tersebut tentunya ada sistem yang dipergunakan oleh LPD untuk mencegah terjadinya kredit macet. Salah satu sistem informasi menggunakan untuk mendapat hasil yang baik yaitu diterapkannya SIA.

SIA adalah sejenis sistem pemrosesan data akuntansi, yang menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen terstruktur dengan mengoordinasikan orang, alat, dan metode interaktif dalam organisasi terstruktur. Jika salah satu sistem informasi menggunakan sistem informasi akuntansi yang ada berkinerja baik akan memberikan manfaat (Susanto, 2008). Sistem informasi akuntansi (SIA) berperan penting dalam memberikan kredit untuk mendukung kelancaran operasional dan kelangsungan usaha kecil. LPD dalam pemberian kredit. Dengan sistem informasi yang berkualitas dan efisiensi, teknis dapat mempengaruhi kepuasan nasabah dan para pekerja yang lebih tinggi dan produktivitas serta dapat mencegah kesalahan yang dapat merusak LPD dan mencegah terjadinya pinjaman yang mengakibatkan terjadinya kredit macet memungkinkan bahwa kegiatan perkreditan terus meningkat. Hal serupa juga disampaikan oleh Sudiarta (2017) yang menyatakan bahwa LPD yang tidak sehat diakibatkan oleh ketidak tepatan dalam penerapan sistem informasi akuntansi dalam penyaluran kredit.

Sistem informasi terkomputerisasi tidak diragukan lagi diperlukan untuk lembaga keuangan saat ini, karena sistem informasi akuntansi dapat mendukung informasi keuangan dan non-keuangan dengan cara yang lebih praktis dan efisien.

Secara umum dapat dijelaskan Sistem Informasi Akuntansi adalah kumpulan struktur dan prosedur berbasis teknologi informasi yang bekerja sama untuk mengubah data keuangan menjadi informasi keuangan yang berguna bagi pemangku kepentingan. Menurut Sutabri (2004), Tujuan pengembangan sistem informasi akuntansi berarti bahwa untuk mendapatkan informasi yang benar, tepat waktu dan berkualitas tinggi, pengembangan sistem informasi akuntansi harus diselesaikan dalam waktu yang wajar dan sistem informasi akuntansi harus memenuhi kebutuhan informasi organisasi dan kebutuhan pengguna sistem.

Beberapa peneliti sebelumnya pernah melakukan analisis dan penelitian tentang penerapan sistem informasi akuntansi. Salim (2015), menyebutkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dalam memberikan dukungan dalam proses pemberian kredit kepada PT. Bank Bukopin Manado telah dikelola dengan baik dan memadai, dan bank telah mampu mengatasi terjadinya tunggakan kredit untuk menghindari kerugian yang signifikan. Selanjutnya Murti (2017), menyebutkan bahwa dengan diterapkannya SIMDA Keuangan, transparansi sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah menjadi lebih terlihat karena mampu memberikan penjelasan secara detail mengenai alur dari setiap transaksi keuangan ditambah lagi laporan keuangan yang dihasilkan mampu menghasilkan memberikan informasi keuangan tepat waktu, lengkap, akurat dan dapat diandalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada penelitian ini, peneliti memilih meneliti terkait analisis penerapan sistem informasi akuntansi di kredit menekan angka kredit macet pada LPD Seririt. Peneliti juga memiliki alasan mengenai pengambilan topik ini karena seperti yang kita ketahui, beberapa LPD yang sudah menerapkan sistem informasi akuntansi

masih mengalami masalah seperti adanya kredit macet yang tinggi hingga mengakibatkan LPD tersebut macet hingga mengalami kebangkrutan. Hal tersebut diakibatkan karena dalam penerapan sistem informasi akuntansi masih kurang maksimal atau mungkin ada beberapa LPD yang belum menerapkan sistem informasi akuntansi. Dalam pengelolaan keuangan sangat diperlukannya suatu alat yang memadai dalam memberikan informasi secara cepat dan akurat. Berikut data kredit pada LPD yang ada di Kecamatan Seririt tahun 2020 ditunjukkan pada tabel 1.1 berikut:

Table 1. 1.
Data Perkembangan LPD Menurut Perolehan Laba pada Triwulan I Tahun 2020 di Kecamatan Seririt

No	Nama LPD	Data Kesehatan	Jumlah Aset dan Laba		Jumlah Pegawai
			Aset	Laba	
1	Seririt	Sehat	186.598.000	7.019.000	3
2	Banjarasem	Cukup sehat	693.724.000	2.240.000	3
3	Bestala	Sehat	204.869.000	1.240.000	3
4	Bubunan	Cukup sehat	423.697.000	8.842.000	5
5	Gunung sari	Kurang sehat	218.836.000	3.636.000	3
6	Joanyar kaja	Macet	0	0	0
7	Joanyar kelod	Sehat	552.171.000	4.177.000	3
8	Kalanganyar	Sehat	862.213.000	8.219.000	3
9	Kalianget	Macet	0	0	0
10	Kalisade	Sehat	18.694.266.000	294.393.000	5
11	Lokapaksa	Sehat	212.825.000	1.242.000	4
12	Mayong	Sehat	1.757.858.000	8.106.000	5

13	M. Bestala	Cukup sehat	385.399.000	444.000	3
14	Pangkung P.	Sehat	15.681.350.000	253.738.000	7
15	Patemon	Kurang sehat	191.292.000	7.367.000	4
16	Pengastulan	Sehat	108.139.000	660.000	3
17	Rangdu	Sehat	67.505.000	839.000	4
18	Ringdikit	Tidak sehat	619.766.000	-4.649.000	6
19	Sulanyah	Sehat	1.366.657.000	42.590.000	3
20	Tangguwisia	Sehat	4.873.680.000	22.720.000	4
21	Tegallenga	Cukup sehat	144.488.000	2.192.000	3
22	Ularan	Kurang sehat	978.880.000	2.610.000	4
23	Umeanyar	Sehat	6.551.978.000	47.084.000	3
24	Unggahan	Tidak sehat	16.388.052.000	-19.163.000	7
25	Yeh anakan	Cukup sehat	501.400.000	13.492.000	3
Jumlah			71.665.643.000	709.038.000	91

(Sumber: Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng 2020)

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa beberapa LPD di Kecamatan Seririt mengalami masalah dilihat dari data kesehatannya yang mana terdapat dua LPD yang mengalami macet total dan tidak dapat beroperasi lagi. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor internal dan eksternal. Diantaranya faktor yang menyebabkan LPD macet tentunya dalam penerapan sistem informasi adalah sistem informasi akuntansi, di antaranya akurat tidak berjalan dengan maksimal. Akibat masalah itu, krama desa di wilayah itu tidak dapat menggunakan LPD sebagai lembaga layanan jasa keuangan mereka untuk melakukan pinjaman. Dari data diatas bisa juga disimpulkan bahwa basarnya asset

yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau lembaga keuangan tidak menjamin tingkat kesehatannya. Berdasarkan informasi sebelumnya, peneliti mengangkat judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Pemberian Kredit Untuk Menekan Angka Kredit Macet Pada LPD Seririt”.

1.2 Identifikasi Masalah

LPD Seririt merupakan salah satu LPD menerapkan sistem informasi akuntansi. Dengan penerapan sistem informasi akuntansi yang baik, LPD Seririt mampu mengurangi adanya kredit macet. Walaupun LPD Seririt sudah menerapkan sistem informasi akuntansi, tetapi masih ada batasan terdapat beberapa masyarakat desa pakraman Seririt yang belum memahami mengenai sistem informasi akuntansi yang diterapkan dalam pelayanan kredit. Masyarakat Seririt masih merasa kebingungan dalam mengurus berkas-berkas yang digunakan untuk melakukan pinjaman di LPD Seririt.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada penerapan sistem informasi akuntansi. Dengan banyaknya dampak yang diakibatkan oleh penerapan sistem informasi akuntansi, maka peneliti ini hanya meneliti tentang penerapan dalam pemberian kredit guna menekan angka kredit macet pada LPD seririt, prinsip yang digunakan dan evaluasinya.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada masalah yang dijelaskan di atas, sehingga masalah untuk penelitian ini adalah, diantaranya:

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dalam pemberian kredit untuk menekan angka kredit macet pada LPD Seririt?
2. Prinsip apa yang diterapkan untuk mengendalikan kredit dalam menciptakan Lembaga Perkreditan yang sehat pada LPD seririt?
3. Bagaimana hasil evaluasi terhadap penerapan sistem informasi akuntansi dalam pemberian kredit untuk menekan angka kredit macet pada LPD Seririt?

1.5 Tujuan Masalah

Berdasarkan uraian pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi dalam pemberian kredit guna menekan angka kredit macet pada LPD Seririt.
2. Untuk mengetahui prinsip apa yang diterapkan untuk mengendalikan kredit dalam menciptakan Lembaga Perkreditan yang sehat pada LPD seririt.
3. Untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi terhadap penerapan sistem informasi akuntansi dalam pemberian kredit untuk menekan angka kredit macet pada LPD Seririt.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diberikan pada penelitian ini, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan kajian untuk penelitian selanjutnya serta diharapkan dapat mengembangkan sistem informasi akuntansi secara lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi LPD Seririt

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi yang membantu LPD Seririt dalam menangani masalah-masalah yang terjadi dalam informasi akuntansi dan upaya mengurangi kredit bermasalah, sehingga dapat memberikan solusi jika terjadi masalah dan dapat mencegahnya.

b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat yang dapat digunakan untuk menambah bahan dan referensi untuk dibaca di perpustakaan, serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin belajar di masa yang akan datang.

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan studi ini dalam penyediaan kredit publik dan menunjukkan bagaimana hal itu berlaku untuk LPD dalam sistem informasi akuntansi.